

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISTILAH / SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Mineral dan Batubara	11
B. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara	

1. Cakupan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara	16
2. Asas dan Tujuan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara	19
3. Penggolongan Mineral dan Batubara	22
4. Bentuk Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.....	25
5. Reklamasi	27
 C. Pertambangan Mineral dan Batubara di Era Otonomi Daerah	
1. Konsep Otonomi Daerah	29
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	33
3. Tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.....	35
4. Penguasaan dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	37
 D. Tinjauan Tentang Daerah Aliran Sungai	
1. Pengertian Sungai.....	39
2. Pengaturan Tenang Sungai	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	43
 B. Jenis Penelitian	
1. Penelitian Kepustakaan	43
2. Penelitian Lapangan	
a. Jenis Data	46
b. Lokasi	47
c. Teknik Pengambilan Sampel.....	47

d. Subyek Penelitian	47
e. Sarana Pengumpul Data	48
C. Jalannya Penelitian	
1. Tahap Persiapan	49
2. Tahap Pelaksanaan	49
3. Tahap Penyelesaian	50
D. Analisis Hasil Penelitian	50
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Implikasi Terbitnya UU No 23 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Pertambangan Pasir di Sungai Serayu, Kabupaten Banjarnegara	
1. Implikasi Terhadap Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Setelah Beralihnya Kewenangan Urusan Pemerintah Bidang Pertambangan	
a. Kelembagaan	52
b. Peraturan Perundang-Undangan	53
c. Perizinan Pengelolaan Pertambangan	55
d. Rencana Tata Ruang	61
e. Pendapatan Asli Daerah	63
f. Pengawasan Terhadap Pertambangan	64
2. Implikasi Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan	
a. Berpindahnya Tempat Pengurusan Izin	67
b. Proses Pengurusan Izin	68
c. Maraknya Penambangan Liar	69

3. Dampak Bagi Lingkungan	
a. Dampak Negatif	71
b. Dampak Positif	71
B. Upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Mengatasi Permasalahan Yang Timbul Dari Kegiatan Pertambangan Pasir di Sungai Serayu Setelah Terbitnya UU No 23 Tahun 2014	
1. Upaya Pencegahan	72
2. Upaya Pembinaan.....	73
3. Upaya pengawasan	74
4. Upaya Normalisasi Sungai Serayu.....	75
5. Upaya Penertiban	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84